



Mobilitas dan Keekerabatan Pada Masyarakat Negeri Hitu Lama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah

Prapti Murwani^{1*}, Aholiab Watloly², Dominggus. E. B. Saija³, Firdan A. Wijaya⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 15, 2026

Revised March 19, 2026

Accepted March 19, 2025

Available online March 27, 2026

Kata Kunci :

Mobilitas Penduduk, Keekerabatan, Masyarakat Adat, Pola Permukiman, Migrasi, Negeri Hitu Lama

Keywords:

Population Mobility, Kinship, Indigenous Communities, Settlement Patterns, Migration, Negeri Hitu Lama



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan gambaran mengenai proses mobilitas penduduk dalam membentuk hubungan keekerabatan di Negeri Hitu Lama. Penelitian ini juga menjelaskan metodologi atau pendekatan yang digunakan, temuan atau hasil utama, serta kesimpulan atau implikasi yang diperoleh. Negeri Hitu Lama merupakan negeri adat yang memiliki sejarah panjang dalam proses mobilitas penduduk di wilayah kepulauan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. FGD (Fokus Group Discation) juga dilakukan untuk memastikan ketepatan informasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemukiman antara masyarakat pendatang dan masyarakat asli cenderung terpisah. Sebagian besar pendatang tinggal di wilayah pinggiran Negeri Hitu Lama, sedangkan penduduk asli menetap di pusat negeri. Hubungan keekerabatan yang terbentuk pada umumnya terjadi melalui proses perkawinan, perdagangan, syiar agama dan proses interaksi dan sosialisasi antara pendatang dan penduduk asli. Hal ini disebabkan oleh proses mobilitas yang telah berlangsung cukup lama di Negeri Hitu Lama, bahkan terjadi secara turun-temurun hingga akhirnya menetap. Kondisi tersebut menjadikan para pendatang yang tinggal di wilayah Hitu Lama sebagai bagian dari masyarakat Hitu.

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide a description of the process of population mobility in shaping kinship relationships in Negeri Hitu Lama. This research also explains the methodology or approach employed, the main findings, as well as the conclusions or implications derived from the study. Negeri Hitu Lama is a traditional village with a long history of population mobility within the archipelagic region. This study employs a qualitative method, using in-depth interviews, observation, and documentation as data collection techniques. FGD (Focus Group Discussion) was also conducted to ensure the accuracy of information in the field. The findings indicate that settlement patterns between migrant communities and indigenous residents tend to be spatially separated. Most migrants reside in the peripheral areas of Negeri Hitu Lama, while the indigenous population lives in the central area of the village. The kinship relationships that have developed are largely formed through marriage process, trade, religious propagation, processes of interaction and socialization between migrants and indigenous residents. This situation is influenced by the long-standing mobility process that has taken place in Negeri Hitu Lama, continuing across generations until migrants eventually settled permanently. As a result, migrants living in the area have become an integral part of the Hitu community.

1. PENDAHULUAN

Mobilitas penduduk merupakan fenomena sosial yang dijumpai di hampir setiap wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar manusia yang dinamis dan terus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam kajian migrasi kontemporer, mobilitas dipahami sebagai bagian dari strategi rumah tangga untuk mempertahankan keberlanjutan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Migrasi bukan sekadar respons terhadap kemiskinan, melainkan bagian dari proses transformasi sosial yang lebih luas. Dengan demikian, mobilitas penduduk bukanlah anomali, melainkan elemen inheren dalam perkembangan masyarakat. Hubungan antara migrasi dan pembangunan tidak bersifat linear, otomatis, maupun deterministik. Selama beberapa dekade,

*Corresponding author

E-mail addresses: prapti.murwani@lecturer.unpatti.ac.id (Prapti Murwani)

perdebatan akademik telah bergerak dari optimisme (migrasi sebagai motor pembangunan), ke pesimisme (migrasi sebagai penyebab ketergantungan dan ketimpangan), lalu kembali ke optimisme yang lebih moderat. Namun, Haas (2016) menegaskan bahwa kedua posisi ekstrem tersebut terlalu menyederhanakan realitas. Selain itu, Czaika & Weisner (2025) menjelaskan bahwa migrasi tidak bisa dijelaskan melalui satu akar penyebab seperti kemiskinan, konflik, atau degradasi lingkungan tetapi migrasi merupakan hasil dari konfigurasi kompleks berbagai faktor yang saling berinteraksi. Aspirasi migrasi terbentuk melalui kombinasi kesulitan struktural (kemiskinan, ketidakamanan, tata kelola yang lemah, tekanan lingkungan) dengan faktor sosial-budaya seperti budaya migrasi dan jaringan transnasional. Namun, aspirasi yang luas tidak otomatis menghasilkan migrasi aktual.

Salazar (2013) menjelaskan secara detail bahwa mobilitas merupakan bagian dari pengalaman hidup masyarakat di sebagian besar wilayah kepulauan Indonesia. Sejarawan Adrian Vickers bahkan menyatakan bahwa unsur mobilitas merupakan titik awal dalam memahami sejarah sosial Indonesia secara kritis. Penduduk awal kepulauan ini tersebar dan, karena kebutuhan hidup, bersifat mobile secara geografis. Pada masa pra-kolonial, perdagangan dan interaksi lainnya berlangsung melalui jalur-jalur antarpulau. Tidak semua pergerakan bersifat jarak jauh atau melalui laut. Para peladang berpindah juga terbiasa menetap kembali untuk mencari lahan baru yang saat itu masih melimpah. Seluruh kepulauan merupakan ruang tanpa batas yang diwarnai pertukaran yang terus-menerus. Semangat merantau atau keinginan untuk mengembara sering dilekatkan pada kelompok etnis tertentu seperti Bugis, Minangkabau, Bawean (Boyan), dan Banjar. Namun, bahkan kelompok yang biasanya dianggap lebih menetap, seperti masyarakat Bali, juga memiliki sejarah migrasi dan pergerakan. Kedatangan pedagang asing semakin memperluas mobilitas di kawasan ini. Pola, arah, dan motivasi pergerakan mengalami perubahan signifikan pada masa kolonialisme. Mobilitas meningkat dan bentuk-bentuk baru diperkenalkan, terutama migrasi yang disponsori negara dan kerja kontrak. Namun bagi administrasi kolonial Belanda, komunitas yang menetap dianggap sebagai ideal politik, ekonomi, dan sosial. Sejak abad ke-19, rumah tangga, desa, survei tanah, sensus, peta, dan sekolah menjadi teknologi kekuasaan yang digunakan untuk mengontrol pergerakan penduduk. Penguasaan wilayah pesisir dan laut juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Pergerakan bebas dan setengah nomaden dianggap sebagai ancaman terhadap mekanisme kontrol negara kolonial. Meski demikian, beberapa kelompok tetap memilih untuk mempertahankan mobilitas karena memberikan keuntungan ekonomi (perdagangan), sosial (status), dan politik (kemandirian).

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, yang ditandai oleh keberadaan banyak pulau atau gugusan daratan yang saling terhubung melalui lautan. Indonesia juga disebut sebagai benua maritim karena wilayah laut dan perairannya menyatu secara harmonis dengan pulau-pulau yang ada. Dalam berbagai kajian sejarah, ditegaskan bahwa peradaban maritim kepulauan menjadi dasar utama terbentuknya jaringan identitas Melayu, kerajaan-kerajaan Islam, serta pelabuhan niaga yang telah berkembang sejak masa pra-modern di Asia Tenggara. Lebih jauh lagi, wilayah ini pernah berperan sebagai pelabuhan laut berskala global (Yahya et al., 2021). Daerah kepulauan seperti Maluku merupakan wilayah dengan tingkat mobilitas yang relatif tinggi (Ralahalu & Jinca, 2013). Karakter geografis yang terdiri atas pulau-pulau kecil mendorong terjadinya perpindahan antarpulau untuk kepentingan perdagangan, perkawinan, maupun jaringan sosial. Henley (2005) menjelaskan bahwa masyarakat kepulauan di Pasifik dan Asia Tenggara memiliki tradisi mobilitas yang bersifat sirkuler dan historis. Dalam konteks Maluku, sejarah panjang pelayaran dan perdagangan menjadikan mobilitas sebagai bagian dari praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun.

Sejarah pembentukan negeri-negeri adat di Maluku juga tidak dapat dilepaskan dari proses mobilitas. Banyak komunitas adat terbentuk melalui migrasi kelompok tertentu yang kemudian menetap dan membangun struktur sosial baru. Masyarakat kepulauan sering membangun identitas kolektif melalui narasi asal-usul yang berkaitan dengan perpindahan

leluhur. Oleh sebab itu, mobilitas penduduk bukan hanya fenomena demografis, tetapi juga bagian dari kosmologi dan memori kolektif masyarakat adat, khususnya di wilayah pedesaan (Yusra, 2023). Kepulauan Maluku dikenal memiliki sistem kekerabatan yang kuat, salah satunya ditandai dengan penggunaan marga di belakang nama sebagai simbol identitas genealogis (Sukmi et al., 2023). Dalam perspektif antropologi, sistem kekerabatan berfungsi sebagai dasar pengorganisasian sosial, distribusi hak atas tanah, dan penguatan solidaritas kelompok. Keekerabatan bukan hanya relasi biologis, tetapi juga konstruksi sosial yang membentuk struktur komunitas. Dalam konteks Maluku, sistem marga menjadi perekat identitas sekaligus mekanisme integrasi sosial (Matitaputty, 2021).

Negeri Hitu Lama merupakan salah satu negeri adat dengan jumlah pendatang yang cukup besar di wilayah petuanannya. Kondisi ini berkaitan erat dengan sejarah Hitu sebagai kerajaan dan pusat perdagangan rempah-rempah yaitu khususnya cengkeh dan pala yakni pada abad ke-15 hingga ke-17. Pada pengujung abad ke-16, muncul pesaing-pesaing Eropa lain terutama Belanda yang tiba di Maluku melalui beberapa ekspedisi yang tiba di Hitu (Pulau Ambon) dan Kepulauan Banda sejak tahun 1599 hingga 1600. Keberhasilan ekspedisi ini kemudian menjadikan Belanda mendirikan badan usaha pada tahun 1602 yang disebut *Vereenigde Oostindische Compagnie* atau VOC. Sejak saat itu, Belanda melakukan berbagai upaya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku, terutama melalui kebijakan monopolinya (Mansyur, 2013). Selain itu, Kaartinen (2019) menjelaskan bahwa kawasan Maluku menjadi simpul perdagangan global pada masa itu, yang menarik pedagang dari berbagai etnis dan wilayah. Sejarah perdagangan ini menjadi fondasi awal terbentuknya masyarakat multietnis di Hitu. Daya tarik ekonomi tersebut mendorong banyak kelompok etnis untuk datang dan menetap secara permanen di Negeri Hitu. Seiring waktu, beberapa di antaranya telah tinggal secara turun-temurun dan menjadi bagian dari struktur sosial lokal. Dalam teori jaringan migrasi Massey et al. (2013) menyatakan bahwa migrasi cenderung berlanjut melalui jaringan sosial yang sudah terbentuk sebelumnya, sehingga menciptakan pola migrasi berkelanjutan lintas generasi. Fenomena ini tampak jelas dalam dinamika demografis Negeri Hitu Lama. Menariknya, jumlah pendatang di beberapa wilayah petuanan Negeri Hitu Lama bahkan melebihi jumlah penduduk asli. Meskipun demikian, hubungan sosial antara pendatang dan masyarakat asli relatif harmonis dan menunjukkan tingkat kedekatan yang kuat. Moustakas (2023) menekankan pentingnya modal sosial dalam membangun kohesi masyarakat multikultural. Interaksi sehari-hari, kerja sama ekonomi, serta hubungan perkawinan menjadi sarana terbentuknya ikatan sosial yang melampaui batas etnis.

Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti karena sebagian besar studi mobilitas di Indonesia lebih banyak berfokus pada wilayah pulau besar atau kawasan perkotaan. Studi tentang mobilitas di pulau-pulau kecil relatif terbatas, padahal dinamika sosialnya memiliki karakteristik yang berbeda. Baldacchino (2006) menegaskan bahwa masyarakat pulau kecil memiliki pola relasi sosial yang unik, di mana kedekatan sosial dan keterbukaan terhadap pendatang dapat berjalan bersamaan dengan kuatnya identitas lokal. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa pulau, terutama pulau kecil, memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan wilayah daratan. Pulau bahkan sering menjadi gambaran yang lebih nyata atau lebih ekstrem dari berbagai proses sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sebenarnya juga terjadi secara umum di tempat lain. Karena keunikan tersebut, pulau layak untuk terus dijadikan fokus kajian dan penelitian akademik. Pada dasarnya, studi kepulauan berusaha memahami apa yang membentuk sifat kepulauan serta bagaimana sifat tersebut memengaruhi lingkungan, perilaku manusia, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Kajian ini mencakup berbagai bidang ilmu, baik disiplin tradisional seperti arkeologi, ekonomi, dan sastra, maupun bidang multidisiplin seperti ekonomi politik dan biogeografi. Selain itu, studi kepulauan juga berkaitan dengan berbagai isu kebijakan, seperti tata kelola, modal sosial, pengelolaan limbah, kepunahan bahasa, serta pariwisata berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian mengenai mobilitas penduduk di Negeri Hitu Lama memiliki signifikansi akademik dan kontekstual.

Mayoritas masyarakat Maluku merupakan masyarakat adat yang tetap mempertahankan struktur tradisional, namun pada saat yang sama menunjukkan keterbukaan terhadap pendatang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mobilitas tidak selalu berujung pada konflik, melainkan dapat menghasilkan integrasi sosial yang memperkaya struktur masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan studi mobilitas di wilayah kepulauan serta memperluas pemahaman mengenai dinamika masyarakat adat dalam menghadapi perubahan sosial. Oleh sebab itu dalam penelitian ini dapat dirumuskan pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana proses mobilitas dalam membentuk kekerabatan yang terbentuk karena mobilitas penduduk negeri Hitu Lama?

2. KAJIAN LITERATUR

Kajian mengenai mobilitas penduduk telah banyak dilakukan oleh para ahli. Salah satunya disampaikan oleh Meiyenti & Afrida (2018) dalam penelitiannya tentang masyarakat Minangkabau. Ia menjelaskan bahwa tradisi merantau bagi orang Minangkabau tidak semata-mata bertujuan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat identitas budaya, yakni memperkaya dan memperluas makna alam Minangkabau. Oleh karena itu, masyarakat Minangkabau yang berada di perantauan umumnya tetap memiliki hubungan kekeluargaan yang erat. Mereka juga memiliki prinsip bahwa sebelum mencapai keberhasilan, mereka tidak akan kembali ke kampung halaman. Kajian tentang mobilitas penduduk di wilayah pulau kecil juga telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Migrasi dapat membantu sekaligus menghambat keberlanjutan kehidupan masyarakat atol di tengah perubahan iklim. Di satu sisi, migrasi dapat mengurangi tekanan terhadap ekosistem yang rapuh dan memberi kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara lebih berkelanjutan. Namun di sisi lain, migrasi juga dapat mengurangi sumber daya manusia dan keuangan yang sebenarnya dibutuhkan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Akibatnya, dampak perubahan iklim bisa semakin besar dan mendorong migrasi lanjutan, bahkan sampai menyebabkan pulau ditinggalkan. Penelitian Jarillo & Barnett (2024) menunjukkan bahwa ketika para migran tetap menjaga hubungan yang kuat dan bermakna dengan daerah asalnya, yaitu memiliki rasa memiliki yang berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya, maka keberlanjutan atol justru dapat meningkat. Hal ini terjadi karena para migran tetap peduli terhadap masa depan komunitas asal mereka dan berkontribusi dalam bentuk dukungan finansial maupun sumber daya lainnya yang membantu masyarakat beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Sementara Jokela (2021) menjelaskan bahwa motivasi seseorang melakukan mobilitas adalah karena alasan pekerjaan dan pendidikan. Jibril (2023) menjelaskan bahwa faktor terbesar yang memengaruhi seseorang untuk berpindah pekerjaan adalah pertimbangan ekonomi, terutama gaji atau kompensasi. Karena tekanan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, karyawan terpaksa mencari dan menerima posisi dengan gaji yang lebih tinggi. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa gaji karyawan sangat memengaruhi bagaimana mereka menjalankan kewajiban mereka di dalam perusahaan. Pekerja berpikir bahwa pendapatan atau upah mereka menjamin kelangsungan hidup mereka dan kelangsungan hidup keluarga mereka. Beberapa studi menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja dapat mendorong pembangunan terkoordinasi antar wilayah, sehingga mencapai tujuan kemakmuran bersama, sementara yang lain percaya bahwa mobilitas tenaga kerja hanya akan memperburuk kesenjangan regional (Yang et al., 2023). Penelitian-penelitian mobilitas di daerah kepulauan juga menunjukkan adanya peran pionir sangat kuat dalam proses mobilitas. Pola mobilitas berantai merupakan salah satu pola yang terdapat di pulau kecil. Jaringan-jaringan yang terbentuk di daerah tujuan seperti jaringan keluarga, jaringan ketetanggaan dan jaringan pertemanan memiliki peran sangat besar dalam menciptakan mata rantai migran. Beberapa penelitian di atas menjelaskan bahwa mobilitas pada masyarakat kepulauan merupakan budaya yang telah berlangsung turun temurun. Mobilitas penduduk menciptakan jaringan bagi migran untuk menarik migran baru

ke daerah tujuan. Budaya migran ini dilandasi beberapa tujuan dari mobilitas yaitu diantaranya untuk berdagang, kunjungan keluarga, memperluas sumber daya dan juga menciptakan jaringan berdasarkan daerah asal migran.

Mobilitas tempat tinggal merupakan peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan seseorang dan berpotensi mengubah kondisi hidupnya. Secara umum, alasan seseorang pindah rumah dapat dijelaskan secara sederhana. Pada tahap kehidupan tertentu, individu atau keluarga mungkin membutuhkan rumah yang lebih besar, lebih terjangkau, atau dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan tempat tinggal sebelumnya (Gambaro et al., 2017; Cheung & Wong, 2022). Alasan kedua yang paling sering disebut adalah faktor keluarga, yakni sekitar 32 persen. Contohnya, pasangan yang menikah pindah untuk tinggal bersama, pasangan yang bercerai pindah untuk berpisah, atau seseorang ingin tinggal lebih dekat dengan orang tua yang telah lanjut usia. Sekitar 10 persen perpindahan juga didorong oleh alasan pekerjaan, seperti memperoleh pekerjaan baru atau ingin tinggal lebih dekat dengan tempat kerja. Selain itu, kepuasan terhadap lingkungan tempat tinggal juga berperan dalam keputusan pindah. Sebagian orang lebih menyukai lingkungan pedesaan yang tenang, sementara yang lain tertarik pada wilayah perkotaan yang menawarkan kehidupan sosial yang lebih aktif (Jokela, 2008; Kley, 2011; Clark & Coulter, 2015). Penelitian dalam bidang psikologi geografis menunjukkan bahwa sifat kepribadian cenderung tersebar secara tidak merata di berbagai wilayah geografis. Artinya, beberapa daerah lebih banyak dihuni oleh individu dengan karakter kepribadian tertentu. Studi longitudinal juga menemukan bahwa sifat kepribadian berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk berpindah tempat tinggal, termasuk perpindahan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Misalnya, sifat ekstroversi dan keterbukaan terhadap pengalaman dikaitkan dengan tingkat mobilitas tempat tinggal yang lebih tinggi (Campbell, 2019; Jokela, 2020)

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam makna, pengalaman, serta pengetahuan kolektif masyarakat terkait proses mobilitas dan sejarah perpindahan hingga terbentuknya Negeri Hitu Lama. Fokus utama penelitian ini adalah memahami dinamika sosial, historis, dan spasial yang melatarbelakangi perpindahan tersebut, sehingga pendekatan kualitatif dinilai paling relevan untuk menangkap narasi, interpretasi, serta perspektif masyarakat secara komprehensif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*). Wawancara dilakukan secara langsung dan semi-terstruktur kepada 6 Informan yang terdiri dari tokoh adat, para tetua adat, serta individu-individu yang memiliki pengetahuan luas mengenai sejarah perjalanan, perpindahan penduduk, serta proses sosial dan budaya yang mengarah pada terbentuknya Negeri Hitu Lama. Pemilihan informan dilakukan secara purposif (*purposive sampling*), dengan mempertimbangkan otoritas, pengalaman, serta kapasitas informan dalam memahami sejarah dan struktur adat setempat. Melalui wawancara mendalam ini, peneliti berupaya menggali informasi terkait faktor pendorong dan penarik perpindahan, jalur mobilitas yang ditempuh, pola interaksi antarkelompok, serta dinamika sosial yang menyertai proses tersebut. Sementara itu, FGD dilaksanakan untuk memperoleh perspektif kolektif serta memvalidasi informasi yang diperoleh dari wawancara individu. Diskusi kelompok ini memungkinkan terjadinya pertukaran pandangan, klarifikasi informasi, serta penguatan narasi sejarah secara bersama-sama. FGD dilakukan dengan melibatkan 12 orang yang terdiri dari tokoh adat, tetua adat, perangkat negeri dan beberapa penduduk yang merupakan pendatang dan telah tinggal menetap secara turun temurun di Negeri Hitu lama. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merepresentasikan ingatan kolektif masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Chinyere & Val

(2023) bahwa pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana individu mempersepsikan lingkungan sekitar mereka. Meskipun terdapat banyak pendekatan untuk penelitian kualitatif, semuanya memiliki kecenderungan untuk mudah beradaptasi dan berfokus pada pelestarian makna yang kaya ketika menafsirkan data.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menafsirkan data secara sistematis melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Peneliti akan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema tertentu, seperti proses mobilitas, pola perpindahan, pembentukan permukiman, serta perubahan struktur sosial yang terjadi. Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder melalui analisis dokumen dan studi literatur. Dokumen yang dianalisis meliputi arsip sejarah lokal, catatan adat, laporan penelitian terdahulu, serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga penelitian lainnya yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk memperkaya analisis, memberikan konteks historis dan demografis, serta memperkuat validitas temuan lapangan melalui proses triangulasi data. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah mengidentifikasi dan merekonstruksi proses mobilitas yang terjadi, termasuk latar belakang, waktu, serta aktor-aktor yang terlibat dalam perpindahan. Tahap kedua adalah menganalisis pola mobilitas yang terbentuk, baik yang bersifat sementara maupun permanen, serta faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan geografis yang memengaruhinya. Tahap ketiga adalah mengkaji pola pemukiman migran yang berkembang, termasuk pola penyebaran penduduk, struktur ruang permukiman, serta hubungan kekerabatan dan adat yang terbentuk dalam komunitas baru. Melalui tahapan ini, penelitian diharapkan mampu menunjukkan keterkaitan antara mobilitas masyarakat dengan pembentukan struktur sosial dan ruang permukiman di Hitu Lama. Dengan pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif, mendalam, dan kontekstual mengenai dinamika perpindahan masyarakat hingga akhirnya Hitu ditetapkan dan berkembang sebagai tempat tinggal yang menetap sampai saat ini. Penelitian ini dilaksanakan di Negeri Hitu Lama, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, yang dipilih karena memiliki nilai historis dan kultural yang kuat dalam proses mobilitas dan pembentukan komunitas adat di wilayah tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Mobilitas Negeri Hitu

Secara administratif Negeri Hitulama terletak di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dengan luas 26 Km², yang ditempati oleh 3 Wik (kompleks) di desa induk dan memiliki 4 dusun dengan jumlah penduduk 8679 jiwa tahun 2019. Negeri Hitulama dikenal sebagai negeri yang dulunya merupakan Kerajaan Tanah Hitu yang berdiri pada abad VII Masehi. Kerajaan Tanah Hitu mencapai kejayaannya pada masa 1470-1682, yaitu sejak rajanya yang pertama (Zainal Abidin Baina Yasirulah) hingga raja yang keenam (Hunilamu). Pada periode tersebut, Kerajaan Tanah Hitu pernah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat viral di kawasan Maluku. Kondisi inilah yang menyebabkan Portugis dan Belanda sangat berniat menguasai Maluku, salah satunya dengan cara menyerang Kerajaan Tanah Hitu secara habis-habisan. Pada awal abad ke-XV, yaitu pada masa pemerintahan Raja Mateuna, Negeri Hitulama sebagai pusat kegiatan Kerajaan Tanah Hitu dipindahkan ke pesisir pantai. Raja Mateuna adalah raja kelima pada Kerajaan Tanah Hitu yang meninggal pada tanggal 29 Juni 1634.

Kerajaan Tanah Hitu merupakan salah satu kerajaan Islam yang berkembang di Pulau Ambon, Maluku. Kerajaan ini mengalami masa puncak kejayaan sekitar tahun 1470 hingga 1682. Raja pertamanya dikenal dengan gelar Upu Latu Titania, yang berarti Raja yang Bertanya. Berdirinya kerajaan ini tidak terlepas dari peran Empat Tokoh Utama yang berupaya mencari dan memahami makna kepemimpinan serta kebaikan seorang raja. Kedatangan Empat

Tokoh Utama tersebut diyakini sebagai awal mula hadirnya komunitas penduduk asli di Tanah Hitu, yang kemudian berkembang menjadi bagian penting dari masyarakat Pulau Ambon. Keempat tokoh ini juga dikenal sebagai figur penting dalam penyebaran Islam di Maluku. Kehadiran mereka dipandang sebagai bukti historis awal penerapan syariat Islam di wilayah tersebut. Kisah mengenai mereka tercatat dalam berbagai sumber sejarah, baik yang ditulis oleh sejarawan lokal maupun penulis Belanda pada masa lampau, seperti Imam Ridjali, Imam Lamhitu, Imam Kulaba, Holeman, Rumphius, dan Valentijn. Kerajaan Tanah Hitu sendiri telah berdiri sebelum masuknya kekuatan imperialisme Barat ke kawasan kepulauan Maluku (Fatmawati, 2021).

Studi dari Handoko (2006) bahwa penelitian arkeologi Islam di wilayah Ambon pernah dilaksanakan oleh Balai Arkeologi Ambon pada tahun 1996. Kajian tersebut menunjukkan bahwa Jazirah Leihitu, yang pada masa lampau merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Hitu, memiliki banyak tinggalan budaya Islam yang bernilai historis. Dalam penelitian itu, tim arkeologi menemukan dua naskah kuno peninggalan Kerajaan Hitu. Naskah tersebut menggunakan tulisan Arab dan menjadi salah satu bukti kuat masuk serta berkembangnya pengaruh Islam di Maluku. Pada masa kejayaannya, pusat pemerintahan Kerajaan Hitu berada di desa tua Amahitu. Kini, lokasi tersebut berupa kawasan perbukitan yang tidak lagi dihuni. Letaknya sekitar empat kilometer dari Desa Amahitu yang sekarang. Secara administratif, wilayah ini termasuk dalam Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, meskipun secara geografis berada di Pulau Ambon. Catatan sejarah menyebutkan bahwa penduduk awal Jazirah Leihitu adalah kelompok Alifuru yang mendiami daerah pegunungan di Pulau Ambon dan Pulau Seram. Perkembangan kawasan Leihitu semakin pesat setelah kedatangan para pendatang Muslim yang datang dengan tujuan menyebarkan agama Islam sekaligus melakukan aktivitas perdagangan.

Semakin ramainya Hitu, maka mendorong terbentuknya suatu kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Tanah Hitu. Adanya aktivitas perdagangan pada abad ke 15 dengan saudagar dari Jawa yakni Gresik, Tuban, dan Jepara, Hitu secara berangsur-angsur menjadi kerajaan Islam dan menjalin hubungan dengan beberapa kerajaan Islam di Nusantara (Ersanda & Wahyudi, 2023). Pada masanya, Kerajaan Tanah Hitu melakukan kontak yang pertama dengan Portugis, yaitu melalui perlawanan fisik pada perang Hitu I (tahun 1520-1605). Perlawanan tersebut dipimpin oleh Tubanbessy I (Kapitan Sepamole). Pada tahun 1575, Portugis akhirnya menyerah dan angkat kaki dari Tanah Hitu. Sepeninggalan Raja Mateuna, tahta kekuasaan kemudian dipegang oleh salah satu anaknya, Hunilamu yang ditetapkan sebagai Raja Kerajaan Tanah Hitu (Latu Sitania) yang Keenam (1637-1632). Sedangkan anaknya yang lain, Silimual pergi ke kerajaan Houamual (Seram Barat) dan menjadi Kapitan Houmual. Setelah Portugis angkat kaki dari Tanah Hitu, penjajahan kemudian dilanjutkan oleh Belanda yang datang pada tahun 1599. Upaya Belanda menguasai wilayah ini diawali dengan pembangunan benteng pertahanan (Benteng Amsterdam) di Tanah Hitu bagian barat, persisnya terletak di pesisir pantai kaki Gunung Wawane. Raja Hunilamu kemudian bereaksi cepat dengan memerintahkan ketiga perdananya untuk mendirikan negeri baru bernama Hitu Helo yang dalam perkembangan selanjutnya disebut dengan nama Negeri Hila. Letak negeri itu sengaja didirikan berdampingan dengan benteng Belanda. Maksudnya agar dapat membendung pengaruh Belanda di Tanah Hitu. Masuknya Belanda di Tanah Hitu ditandai dengan pecahnya perang Hitu II (Perang Wawane), yaitu antara tahun 1634-1643. Perang ini dipimpin oleh Kapitan Pattiwane (anak dari perdana Jamilu) dan Kapitan Tahalele. Perang Hitu II ini kemudian berlanjut menjadi Perang Kapahaha (tahun 1643-1646) yang dipimpin oleh Kapitan Telukabesi dan Imam Ridjali. Namun, berakhirnya perang ini ditandai dengan kemampuan Belanda menguasai seluruh Jazirah Leihitu termasuk seluruh kekuasaan Kerajaan Tanah Hitu.

Konsekuensi kekalahan ini menyebabkan Belanda melakukan perubahan besar-besaran dalam struktur pemerintahan Kerajaan Tanah Hitu, yaitu dengan cara mengangkat Orang Kaya menjadi raja dari setiap Uli sebagai raja tandingan dari Kerajaan Tanah Hitu. Masa

pemerintahan Raja Hunilamu (1637-1682) merupakan periode terakhir dari kerajaan ini. Dengan strategi politik semacam ini, Belanda akhirnya dapat menghancurkan pemerintahan Kerajaan Tanah Hitu hingga keakar-akarnya. Belanda kemudian menerapkan politik pecah belah (*devidet et impera*) demi tujuan disintegrasi kerajaan, sehingga lambat laun eksistensi Kerajaan Tanah Hitu menjadi hilang. Namun di masa pemerintahan raja Hunilamu, Kerajaan Tanah Hitu tidak hanya meninggalkan peninggalan sejarah berupa bangunan fisik semata tetapi juga telah menghasilkan beberapa pahlawan nasional seperti, Imam Ridjali, Telukabesi, dan Kakiali.

Hingga kini, secara turun-temurun kerajaan tersebut diintegrasikan dalam bentuk kepemimpinan Raja di Negeri Hitulama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Indonesia. Artinya, hingga kini hirarki kerajaan masih terus bertahan, yakni raja yang bergelar (Upu Latu Sitania sampai sekarang. Sebagaimana lazimnya negeri-negeri adat di Maluku, Negeri Hitu juga memiliki sebuah Negeri Lama yang letaknya di atas/puncak gunung. Penduduk Negeri Hitu awalnya menempati wilayah Negeri Lama yang terletak agak jauh dari wilayah pesisir yang sekarang ini menjadi tempat tinggal tetap para penduduk. Dalam upaya menjaga wilayah petuanan mereka dari penduduk lain yang umumnya berasal dari Pulau Seram yang datang dan ingin menempati wilayah pesisir, maka penduduk asli Negeri Hitu kemudian memilih untuk turun dari Negeri Lama dan menempati wilayah pesisir yang sekarang menjadi tempat tinggal mereka hingga saat ini.

Keputusan para penduduk asli Negeri Hitu untuk menempati wilayah pesisir pantai di saat itu semata-mata untuk mempertahankan wilayah mereka karena tingginya mobilitas penduduk dari Pulau Seram yang mencari perlindungan diri dan keluarga mereka. Alasan mobilitas penduduk Pulau Seram di saat itu juga cukup ironi karena mereka menganggap Pulau Seram sebagai Pulau Ibu dan Pulau Ambon sebagai Pulau Ayah sehingga mereka memilih mencari perlindungan. Alasan lainnya, yang kemudian mendorong penduduk Negeri Hitu turun dari Negeri Lama atau kampung awal mereka di gunung adalah karena adanya penjajah Belanda yang akan masuk ke wilayah mereka sehingga mereka harus melakukan perlawanan.

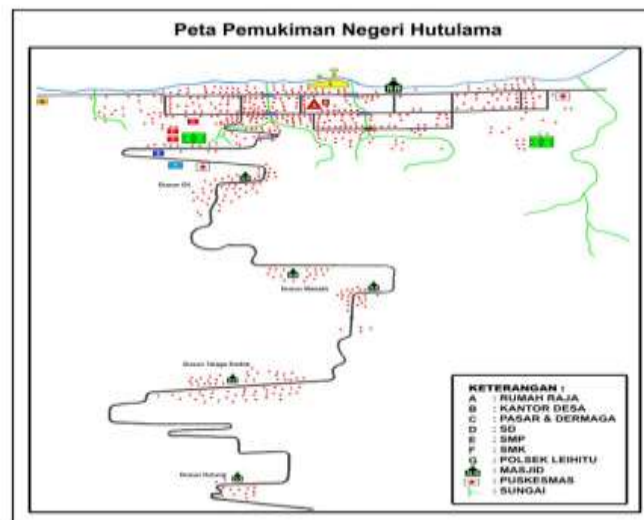
Tantangan terbesar yang dialami penduduk Negeri Hitu pada saat itu ketika mereka harus turun dari Negeri Lama ke wilayah pesisir adalah, mereka harus membangun kembali permukiman atau rumah-rumah tempat tinggal yang baru dan beradaptasi dengan lingkungan pesisir. Kebiasaan berburu dan meramu yang sebelumnya pernah dilakukan mulai berangsur-angsur tidak dilakukan karena umumnya penduduk mulai melakukan aktivitas mencari ikan di laut sebagai nelayan. Perubahan sistem mata pencaharian ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi penduduk Negeri Hitu saat itu karena mereka harus mampu beradaptasi dengan kondisi laut yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Pola Mobilitas

Pola pemukiman penduduk di Negeri Hitu lama menyebar di semua wilayah. Peta pemukiman negeri Hitulama menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk tersegregasi dari penduduk asal negeri hitu dan pendatang. Beberapa wilayah di Negeri hitu lama banyak di tinggali oleh pendatang dari Pulau Buton, dan mereka telah tinggal antar generasi di petuanan negeri Hitu Lama. Sementara penduduk asli dari Hitu Lama sebagian besar tinggal disekitar negeri hitu lama. Warga asli negeri hitu tinggal sebagian besar di seputar rumah adat, sementara di wilayah pinggiran sebagian besar mereka adalah pendatang dari buton dan sebagian juga telah berbaur dengan suku lain seperti bugis. Beberapa warga bugis juga berada tinggal di wilayah seputar pasar, hal ini tidak bisa kita pungkiri bahwa warga dari bugis sebagian besar adalah pedagang.

Gambaran 1 menunjukkan bahwa penduduk asli Negeri Hitu pada umumnya mendiami wilayah inti yang berada di sekitar Rumah Adat hingga mencapai batas perbatasan dengan Negeri Hitu Mesing. Wilayah ini merupakan kawasan yang secara historis dan kultural menjadi

pusat kehidupan masyarakat adat, sekaligus menjadi ruang utama pelaksanaan berbagai kegiatan adat dan sosial. Keberadaan penduduk asli di area tersebut mencerminkan kesinambungan hubungan antara ruang, identitas, dan struktur sosial yang telah terbentuk sejak lama. Sementara itu, masyarakat pendatang cenderung menetap di wilayah-wilayah tertentu yang tersebar di beberapa dusun dalam petuanan Negeri Hitu. Pola pemukiman ini menunjukkan adanya pembagian ruang yang relatif jelas antara wilayah inti yang dihuni oleh penduduk asli dan wilayah pinggiran yang lebih banyak ditempati oleh pendatang. Secara administratif dan adat, Negeri Hitu membagi wilayahnya ke dalam beberapa WIK (wilayah ikatan kekerabatan). Secara umum, pembagian WIK tersebut terbagi menjadi tiga wilayah utama yang didasarkan pada pembagian teritorial dan struktur sosial yang berlaku di Negeri Hitu. Sebagian besar wilayah WIK ditempati oleh warga asli Negeri Hitu yang memiliki hubungan genealogis dan ikatan adat yang kuat. Sementara itu, wilayah-wilayah di bagian pinggiran atau perbatasan Negeri Hitu lebih banyak dihuni oleh masyarakat pendatang, khususnya yang berasal dari Buton. Pola ini menggambarkan adanya struktur spasial yang tidak hanya bersifat geografis, tetapi juga berkaitan dengan sejarah kedatangan, integrasi sosial, serta dinamika hubungan antara masyarakat asli dan pendatang di Negeri Hitu.



Gambar 1. Peta Pemukiman Negeri Hutulama

Peristiwa perpindahan penduduk dari Negeri Lama ke wilayah pesisir bukan hanya mengalami perubahan dan tantangan tetapi juga menciptakan hubungan-hubungan kekerabatan antar penduduk. Masuknya penduduk Pulau Seram yang kemudian menempati wilayah pesisir dan sekaligus melakukan perkawinan dengan penduduk Negeri Hitu telah menciptakan sebuah hubungan kekerabatan yang abadi hingga saat ini. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan yang mengatakan bahwa: “Salah satu hubungan kekerabatan tercipta karena perkawinan, salah satunya perkawinan, perdagangan dan juga syiar agama. Kekerabatan karena perkawinan biasanya dilakukan dengan melakukan duduk bersama agar bisa saling lihat antar marga satu dengan marga lainnya. Menurut ajaran para orang tua kita harus saling melihat satu dengan lainnya agar hubungan persaudaraan semakin erat dan perpecahan tidak terjadi”

Guna tetap menjaga hubungan-hubungan kekerabatan tersebut maka Negeri Hitu kemudian di bagi menjadi tiga wilayah petuanan (Wik), yaitu 1), wilayah/wik Tomu, 2), wilayah/wik Tengah, 3), wilayah/wik Ujung. Penduduk yang telah diikat oleh hubungan-hubungan kekerabatan tersebut kemudian menyebar untuk menempati ketiga wilayah dan menjalankan berbagai adat budaya yang dimiliki. Pada Awalnya Beberapa Wik ditempati oleh marga-marga tertentu sebagaimana terinci pada Tabel 1.

Tabel 1. Persebaran Marga di Negeri Hitu

WIK TOMU	WIK TENGAH	WIK UJUNG
1. Waliulu	1. Pelu kacili	1. Pelu maulana
2. Twael	2. Pelu latuhelu	2. Wael
3. Ruhunusa	3. Pelu tuluhai	
4. Nunlehu	4. Pelu babatu (raja)	
5. Tomu	5. Nasela	
6. Tatawalat		
7. Waulat		
8. Rumahallo		
9. Kolli		
10. Uwen		
11. Wailussy		
12. Lulun		

Sumber: Hasil Penelitian

Akan tetapi keberadaan marga dalam Wik tertentu telah bergeser dan sudah mengalami percampuran salah satunya karena adanya perkawinan. Akan tetapi pada saat-saat tertentu mereka kembali ke WIK asal mereka. Misalnya pada saat adanya acara-acara adat. Sebagaimana di sampaikan oleh salah satu informan yang menjelaskan bahwa “marga-marga yang tinggal di masing-masing wik telah mengalami perubahan karena adanya perkawinan antar marga, sehingga istri harus mengikuti suami tinggal di wiknya suami, begitu sebaliknya, akan tetapi pada saat-saat kegiatan adat mereka kembali ke wik masing-masing untuk melaksanakan ritual adat.” Seiring berjalannya waktu, mobilitas penduduk ke Negeri Hitu terus terjadi dengan masuknya orang-orang dari wilayah Sulawesi Selatan (orang Bugis/Makasar), Sulawesi Tenggara (orang Buton), dan juga dari wilayah Pulau Jawa (orang Jawa). Masuknya warga dari beberapa daerah tersebut telah menambah kemajemukan penduduk Negeri Hitu, bahkan hingga saat ini. Mereka yang datang umumnya para pedagang dan juga tukang bangunan yang melakukan aktivitas mereka di Negeri Hitu. Kebanyakan dari mereka kemudian melakukan perkawinan dengan penduduk Negeri Hitu Lama dan kemudian memilih menetap untuk selamanya, namun ada juga dari mereka yang memilih kembali ke daerah asal untuk bertemu keluarga. Mobilitas dan hubungan-hubungan kekerabatan antar penduduk inipun hingga sekarang masih terus berlangsung sehingga menggambarkan Negeri Hitu Lama sebagai negeri yang majemuk namun tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat dan budaya untuk keberlangsungan hidup serta keutuhan Negeri Hitu hingga saat ini. Salah satu informan menjelaskan bahwa “Proses hubungan kekerabatan yang terjadi adalah karena perkawinan dan misi berdagang, sejarahnya mereka datang dari pulau Seram mencari perlindungan karena Seram merupakan Pulau Ibu sementara Pulau Ambon adalah merupakan pulau ayah, akhirnya mereka tinggal dan beranak pinak di negeri Hitu lama. Penjelasn tersebut mengandung makna bahwa proses mobilitas memiliki nilai budaya yang kuat dan telah menjadi nilai bagi masyarakat yang tinggal di wilayah adat dan menjadi kekuatan dalam menjaga hubungan kekerabatan masyarakatnya.

Hal ini sejalan dengan studi sebelumnya bahwa dalam masyarakat Indonesia, baik ‘migrasi’ maupun ‘perkawinan’ merupakan penanda sosial penting yang menandakan transisi menuju kedewasaan (Khoo & Yeoh, 2018). Secara tradisional, migrasi dikaitkan dengan transisi kedewasaan melalui konsep merantau, yang mengusulkan perjalanan sementara dari kampung halaman ke tempat lain untuk mencari pengalaman, kekayaan, dan pengetahuan dimana sebagai ritual peralihan menuju kedewasaan (Elmhirst, 2002). Mengingat banyaknya peluang kerja/migrasi khusus gender di pasar global, perempuan yang bermigrasi lintas negara sebagai pekerja rumah tangga tidak perlu menanggung biaya di muka untuk memulai perjalanan migrasi, tetapi sebaliknya diberi pinjaman oleh agen tenaga kerja, yang mereka

bayar kembali secara bertahap setelah mulai bekerja. Sebaliknya, laki-laki biasanya perlu mengumpulkan sejumlah besar uang sebagai modal migrasi di muka untuk memfasilitasi usaha mereka di luar negeri (Khoo et al., 2017). Akibatnya, hal ini mengurangi kemampuan laki-laki muda untuk bertransisi ke masa dewasa penuh karena mereka kurang layak menikah, karena tertinggal oleh rekan-rekan perempuan mereka dalam mengumpulkan modal ekonomi dan budaya.

Pola-Pola Keekerabatan Pasca Mobilitas Penduduk

Negeri Hitu dikenal sebagai sebuah negeri adat yang terletak di Jazirah Leihitu dan merupakan salah satu negeri adat tertua di Pulau Ambon. Pola-pola keekerabatan di Negeri Hitu terjalin berdasarkan marga-marga yang ada di negeri tersebut. Marga-marga di Negeri Hitu tersebut seperti diantaranya, marga Pelu, Wael, Ruhunusa, Selang, Lessy, Hurasan, kolly, Rumahalo, Uwen, Asel, dan lain-lain telah membentuk kesatuan masyarakat adat di Negeri Hitu. Salah satu bentuk kegiatan adat yang selalu menjadi simbol pererat hubungan keekerabatan antar marga di Negeri Hitu adalah tradisi “dudu meja”. Tradisi ini dilakukan hanya pada waktu-waktu tertentu, khususnya terkait dengan adanya peristiwa perkawinan antar yang kemudian melibatkan masing-masing marga untuk mengatur semua acara perkawinan melalui tradisi “dudu meja”.

Hubungan-hubungan keekerabatan antar penduduk ini juga tercipta melalui berbagai kegiatan yang turut melibatkan semua marga dalam sebuah kegiatan adat seperti kegaiatan mengganti atap rumah raja. Pada kegiatan ini, semua warga masyarakat adat di Negeri Hitu turut terlibat mulai dari proses persiapan hingga pada proses penyelesaian. Kerja bersama dan gotong royong masih menjadi tradisi warga masyarakat Hitu dan terus dilestarikan hingga sekarang. Kegiatan ini juga terbuka bagi warga lain yang tinggal di Negeri Hitu, dimana mereka tidak terlibat langsung dalam pekerjaan pergantian atap tetapi mereka memiliki kontribus lain seperti menyumbang berbagai macam kebutuhan yang diperlukan pada kegiatan tersebut, seperti misalnya membantu memberikan bahan makanan dan juga minuman. Pola-pola keekerabatan antar penduduk di Negeri Hitu ini telah menjadi modal sosial yang mendukung kestabilan dan kesejahteraan hidup penduduk Negeri Hitu hingga saat ini. Perlu diingat bahwa mobilitas manusia dipengaruhi oleh dinamika kolektif yang terbentuk dari banyak keputusan individu (Cats, 2024). Walaupun kebutuhan dan pilihan perjalanan setiap orang sangat beragam, begitu pula dengan kondisi wilayah perkotaan dan regional tempat mereka tinggal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa mobilitas manusia memiliki pola-pola tertentu yang berulang sepanjang sejarah dan di berbagai wilayah geografis (Ahmed & Stopher, 2014). Selain itu, semakin tersedianya data mobilitas yang rinci memungkinkan para peneliti untuk menganalisis pola pergerakan dari segi waktu dan ruang, serta memahami hubungan antara perilaku individu (mikroskopis) dan arus pergerakan secara keseluruhan (agregat) yang dihasilkannya (Schlöpfer et al., 2021).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pola keekerabatan yang terbentuk dalam masyarakat Negeri Hitu Lama didasarkan pada beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, pola keekerabatan berkembang melalui proses perkawinan, khususnya perkawinan campuran antara penduduk asli dan para pendatang. Perkawinan ini tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempertemukan dua kelompok keluarga yang berbeda, sehingga memperluas jaringan sosial dan memperkuat ikatan kekeluargaan dalam masyarakat. Melalui proses tersebut, para pendatang secara bertahap diterima sebagai bagian dari komunitas adat dan memperoleh posisi dalam struktur sosial setempat. Kedua, pola keekerabatan terjadi karena sejarah panjang dalam berdagang dan syiar agama, kondisi ini tergambar dari marga-marga yang tinggal di pusat negeri dan membentuk wik-wik yang ada di puast negeri. Ketiga, proses kekeluargaan terjadi

melalui hubungan sosial yang intens dan berkelanjutan antara penduduk asli dan pendatang. Interaksi dalam kegiatan ekonomi, aktivitas keagamaan, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan adat dan sosial telah menciptakan hubungan yang bersifat kolektif dan saling bergantung. Hubungan-hubungan ini kemudian berkembang menjadi ikatan sosial yang menyerupai kekerabatan, meskipun tidak selalu didasarkan pada hubungan darah. Dari sisi spasial, pola pemukiman menunjukkan adanya pembagian wilayah yang cukup jelas antara penduduk asli dan pendatang. Sebagian besar masyarakat pendatang menetap di wilayah pinggiran yang berada dalam petuanan Negeri Hitu Lama, sedangkan penduduk asli cenderung terkonsentrasi di pusat negeri. Penduduk asli umumnya tinggal secara mengelompok berdasarkan *wik* atau wilayah adat, yang mencerminkan struktur sosial tradisional yang masih dipertahankan. Sementara itu, para pendatang juga membentuk kelompok permukiman tersendiri di daerah pinggiran. Sebagian besar pendatang tersebut berasal dari wilayah Sulawesi dan telah menetap cukup lama di Negeri Hitu Lama, bahkan hingga beberapa generasi, sehingga keberadaan mereka kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat setempat.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, pemerintah daerah dan lembaga adat perlu memperkuat pelestarian nilai-nilai kekerabatan dan tradisi lokal sebagai modal sosial dalam menghadapi dinamika mobilitas yang terus berlangsung. Tradisi adat yang bersifat inklusif perlu didokumentasikan dan dijadikan bagian dari strategi pembangunan sosial berbasis kearifan lokal. Kedua, diperlukan kebijakan tata ruang dan perencanaan wilayah yang sensitif terhadap dinamika mobilitas penduduk agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial maupun konflik lahan di masa depan. Penguatan dialog antara penduduk asli dan pendatang juga penting untuk menjaga harmoni sosial di tengah pertumbuhan penduduk yang terus bertambah. Ketiga, lembaga pendidikan dan penelitian di Maluku diharapkan dapat mengembangkan studi kepulauan yang lebih kontekstual, terutama yang mengaitkan mobilitas, identitas adat, dan transformasi sosial di pulau-pulau kecil. Ke depan, penelitian mengenai mobilitas dan kekerabatan di wilayah kepulauan seperti Negeri Hitu Lama perlu dikembangkan secara lebih mendalam dan komprehensif. Studi ini masih terbatas pada pendekatan kualitatif dengan fokus pada satu lokasi, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dengan pendekatan komparatif antar negeri adat di Maluku. Pendekatan tersebut akan membantu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pola mobilitas, integrasi sosial, serta dinamika kekerabatan dalam konteks kepulauan yang berbeda. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat menggabungkan metode kuantitatif atau pendekatan campuran untuk mengukur secara lebih sistematis dampak mobilitas terhadap kesejahteraan ekonomi, distribusi sumber daya, serta tingkat kohesi sosial masyarakat. Penggunaan data longitudinal akan sangat membantu dalam melihat perubahan struktur sosial lintas generasi, khususnya terkait dengan pergeseran peran *marga*, *wik*, dan kepemimpinan adat. Dimensi gender juga perlu mendapat perhatian khusus dalam penelitian selanjutnya. Mobilitas laki-laki dan perempuan sering kali memiliki motif, pola, serta implikasi sosial yang berbeda, terutama dalam konteks perkawinan, pembentukan rumah tangga, dan pewarisan identitas *marga*. Kajian mengenai peran generasi muda dalam mempertahankan atau mentransformasi nilai-nilai adat di tengah arus globalisasi juga menjadi penting, mengingat perubahan aspirasi pendidikan, pekerjaan, dan gaya hidup. Lebih jauh, penelitian masa depan dapat mengaitkan mobilitas dengan isu keberlanjutan wilayah pesisir dan perubahan lingkungan. Mengingat Negeri Hitu Lama berada di kawasan kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim dan tekanan ekologis, studi tentang hubungan antara mobilitas, adaptasi lingkungan, dan ketahanan sosial masyarakat adat akan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan berbasis lokal. Dengan pengembangan arah penelitian tersebut, studi mobilitas di wilayah kepulauan tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi perencanaan pembangunan dan pelestarian masyarakat adat di Maluku

6. REFERENSI

- Ahmed, A., & Stopher, P. (2014). Seventy minutes plus or minus 10 — a review of travel time budget studies. *Transport Reviews*, 34(5), 607–625. <https://doi.org/10.1080/01441647.2014.946460>
- Baldacchino, G. (2006). Islands, Island studies, island studies journal. *Island Studies Journal*, 1(1), 3–18.
- Campbell, P. (2019). Dispositional traits and internal migration : Personality as a predictor of migration in Australia. *Journal of Research in Personality*, 78, 262–267. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2018.12.009>
- Cats, O. (2024). Identifying human mobility patterns using smart card data. *Transport Reviews*, 44(1), 213–243. <https://doi.org/10.1080/01441647.2023.2251688>
- Cheung, K., & Wong, D. (2022). Measuring the Stress of Moving Homes : Evidence from the New Zealand Integrated Data Infrastructure. *Urban Science*, 6, 1–17.
- Chinyere, N., & Val, E. (2023). Qualitative Research. *IDOSR Journal Of Computer And Applied Sciences*, 8(1), 20–35.
- Clark, W. A. V., & Coulter, R. (2015). Who wants to move ? The role of neighbourhood change. *Environment and Planning A*, 47(12), 2683–2709. <https://doi.org/10.1177/0308518X15615367>
- Czaika, M., & Weisner, Z. (2025). Migration aspirations and their realisation : a configurational driver analysis of 26 African and Asian research areas. *Comparative Migration Studies*, 13(8), 1–23.
- Elmhirst, R. (2002). Daughters and Displacement: Migration Dynamics in an Indonesian Transmigration Area. *The Journal of Development Studies*, 38(5), 143–166. <https://doi.org/10.1080/00220380412331322541>
- Ersanda, P. A., & Wahyudi, D. Y. (2023). Jaringan perniagaan hitu sebagai bandar rempah dan kajian potensi pembelajaran sejarah dalam kurikulum merdeka untuk jenjang SMK. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 6(2), 264–285.
- Fatmawati, R. (2021). Traditional media as a means of submitting public information for indigenous communities in Ambon Island. *RJOAS: Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 7, 279–283. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2021-07.28>
- Gambaro, L., Joshi, H., & Lupton, R. (2017). Moving to a better place ? Residential mobility among families with young children in the Millennium Cohort Study. *Population, Space and Place Population, Space and Place*, 23(3), 1–14. <https://doi.org/10.1002/psp.2072>
- Haas, H. De. (2016). Migration and development: a theoretical perspective. *International Migration Review*, 44(1), 227–264. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2009.00804.x>
- Handoko, W. (2006). Periode awal Kerajaan Hitu hingga masa surutnya, retrospeksi arkeologi sejarah. *Kapata Arkeologi*, 2(3), 28–46.
- Henley, D. (2005). Population and the means of subsistence : explaining the historical demography of island Southeast Asia , with Particular Reference to Sulawesi. *Journal of Southeast Asian Studies*, 36(3), 337–372. <https://doi.org/10.1017/S0022463405000202>
- Jarillo, S., & Barnett, J. (2024). Migration , belonging , and the sustainability of atoll islands through a changing climate. *Migration and Sustainability*, 121(9), 1–9.
- Jibril, H. T. (2023). Determination of the causes of job mobility in employment. *Hasanuddin Economics and Business*, 7(1), 49–63. <https://doi.org/10.26487/hebr.v6i1.xxxx>
- Jokela, M. (2008). Personality traits and reasons for residential mobility : Longitudinal data from United Kingdom , Germany , and Australia. *Personality and Individual Differences*, 19(9), 831–837. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110978>
- Jokela, M. (2020). Selective residential mobility and social influence in the emergence of neighborhood personality differences : Longitudinal data from Australia. *Journal of Research in Personality*, 86, 103953. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2020.103953>

- Kaartinen, T. (2019). Islamic transformations in the periphery of Maluku, Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 47(138), 184–198. <https://doi.org/10.1080/13639811.2019.1583428>
- Khoo, C. Y., Platt, M., & Yeoh, B. S. A. (2017). Who migrates? tracking gendered access to migration within households “in flux” across time. *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, 15(3), 326–343. <https://doi.org/10.1080/15562948.2017.1283456>
- Khoo, C. Y., & Yeoh, B. S. A. (2018). The entanglements of migration and marriage: negotiating mobility projects among young Indonesian women from migrant-sending villages. *Journal of Intercultural Studies*, 39(6), 704–721. <https://doi.org/10.1080/07256868.2018.1533539>
- Kley, S. (2011). Explaining the Stages of Migration within a Life-course Framework. *European Sociological Review*, 27(4), 469–486. <https://doi.org/10.1093/esr/jcq020>
- Mansyur, S. (2013). Perdagangan Cengkih Masa Kolonial dan Jejak Pengaruhnya di Kepulauan Lease. *KALPATARU, Majalah Arkeolog*, 22(1), 43–60.
- Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., Taylor, J. E., & Arango, J. (2013). Theories of International Migration: A Review and Appraisal. *Population and Development Review*, 19(3), 431–466.
- Matitaputty, J. K. (2021). Totem: Soa and Its Role in the Indigenous Peoples Lives of Negeri Hutumuri - Maluku. *Society*, 9(2), 429–446. <https://doi.org/10.33019/society.v9i2.358>
- Meiyenti, S., & Afrida. (2018). The Inequality of rights and obligations of Minangkabau Men in Matrilineal System. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 7(1), 12–22. <https://doi.org/10.22202/mamangan.2466>
- Moustakas, L. (2023). Social cohesion : definitions, causes and consequences. *Encyclopedia*, 3, 1028–1037.
- Ralahalu, K. A., & Jinca, M. Y. (2013). The development of Indonesia archipelago transportation. *international Refereed Journal of Engineering and Science (IRJES)*, 2(9), 12–18.
- Salazar, N. B. (2013). *The (Im) Mobility of Merantau as a Sociocultural Practice in Indonesia* (Issue Moving Places).
- Schläpfer, M., Dong, L., Keeffe, K. O., Santi, P., Szell, M., Salat, H., Anklesaria, S., Vazifeh, M., Ratti, C., & West, G. B. (2021). The universal visitation law of human mobility. *Nature*, 539, 522–527. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03480-9>
- Sukmi, S. N., Fretes, C. H. J. De, Kudubun, E. E., Seba, O. C., Soukotta, F. K., Sukmi, S. N., Fretes, C. H. J. De, & Kudubun, E. E. (2023). Maluku community identity restoration through local wisdom-based approach. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development (IJSED)*, 5(1), 25–40.
- Yahya, M. T., Salman, D., & Abdullah, S. (2021). Inter-Island mobility and social change in Tidore Kepulauan. *Mimbar*, 37(1), 1–8.
- Yang, X., Li, Q., Luo, S., & Li, Q. (2023). How does labor mobility affect common prosperity?— an empirical study based on a panel of Chinese cities. *Sustainability*, 15, 1–21.
- Yusra, K. (2023). Human Mobility , Sociolinguistic diversity , and social sustainability in rural areas : insights from Indonesian transmigrant communities. *Sustainability*, 15, 1–23.